

**MENGURAI PERMASALAHAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI**

**Tirta Yasa Agung Barus<sup>1</sup>, Rabiatul Adwiyah<sup>2</sup>, Khodijah May Nuri Lubis<sup>3</sup>, Suci Nur Rahma<sup>4</sup>,  
M.Nadhif Faturrahman<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: tirtabarus.5233151023@mhs.unimed.ac.id

Email: 27231400479@mhs.unimed.ac.id; khadjah.5231151020@mhs.unimed.ac.id;

sucinurahma15@mhs.unimed.ac.id; mnadip.5233351028@mhs.unimed.ac.id

**ABSTRACT**

General elections in Indonesia are an important mechanism in the democratic process that aims to elect people's representatives and government leaders. However, the electoral system in Indonesia faces various problems that can threaten the quality of democracy. These problems include the practice of money politics, vote manipulation, and lack of transparency in the election process. In addition, the existence of political intervention and bureaucracy that are not neutral are also serious challenges. The impact of these problems on democracy is very significant, including declining public trust in democratic institutions, weakening public political participation, and hampering the process of forming an accountable and responsive government. Therefore, a comprehensive electoral system reform is needed to strengthen democracy in Indonesia.

**Keywords:** System, Election, Democracy

**ABSTRAK**

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme penting dalam proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Namun, sistem pemilu di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengancam kualitas demokrasi. Permasalahan tersebut meliputi praktik politik uang, manipulasi suara, dan kurangnya transparansi dalam proses pemilu. Selain itu, adanya intervensi politik dan birokrasi yang tidak netral juga menjadi tantangan serius. Dampak dari permasalahan ini terhadap demokrasi sangat signifikan, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, melemahnya partisipasi politik masyarakat, dan terhambatnya proses pembentukan pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pemilu yang komprehensif untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

**Kata kunci:** Sistem, Pemilu, Demokrasi

**PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, telah menganut sistem multipartai sejak era reformasi tahun 1998. Sistem ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan kerangka hukum bagi pembentukan, fungsi, dan kegiatan partai politik di Indonesia. Dalam konteks ini, sistem multipartai diharapkan dapat menciptakan ruang bagi beragam suara dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap kelompok dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, sistem multipartai ini sering kali menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Supriyadi et al. (2024), "Sistem politik tanpa partai

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

di Indonesia dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kali terjadi akibat dominasi partai politik dalam birokrasi pemerintahan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah dominasi partai politik dalam birokrasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, yang semuanya sering kali diisi oleh anggota partai politik. Dalam kenyataannya, peran partai politik tidak hanya berhenti pada proses pemilihan, tetapi juga meluas hingga ke dalam struktur pemerintahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini menciptakan situasi di mana partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam penempatan pejabat publik, yang sering kali mengarah pada praktik nepotisme dan favoritisme. Situasi ini berpotensi merusak integritas dan efisiensi birokrasi, yang seharusnya berfungsi untuk melayani kepentingan publik secara profesional dan objektif. Wicaksana et al. (2023) menekankan bahwa "reformasi sistem kepartaian dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kader dianggap lebih realistis dan efektif dalam memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Fenomena ini telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar dalam birokrasi pemerintahan. Muhammad Rizieq Husein Syihab (2024) mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, posisi-posisi penting di kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya sering kali diisi oleh individu-individu yang tidak memiliki kompetensi yang relevan, tetapi memiliki hubungan dekat dengan partai politik. Keadaan ini menciptakan lingkungan di mana keputusan kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan partai daripada kepentingan publik. Dalam konteks ini, kritik terhadap sistem multipartai sering kali muncul, dengan banyak pihak yang mempertanyakan apakah sistem ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau justru lebih menguntungkan elit politik. Selain itu, dampak dari praktik KKN ini tidak hanya terbatas pada sektor publik, tetapi juga dapat merembet ke sektor swasta, menciptakan ekosistem di mana korupsi menjadi norma dan menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi. Wangsa et al. (2023) mencatat bahwa "meskipun sistem tanpa partai berpotensi membawa dampak positif, tantangan konstitusional, resistensi partai politik, dan risiko terhadap keragaman politik tetap menjadi hambatan signifikan.

Salah satu pandangan yang dikemukakan adalah gagasan untuk membangun negara tanpa partai politik, atau setidaknya mengurangi jumlah partai menjadi dua, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dengan sistem dua partai (bipartisme). Pendukung gagasan ini berpendapat bahwa penghapusan atau pengurangan partai politik dapat mengurangi praktik KKN dan meningkatkan profesionalisme birokrasi pemerintahan. Dengan mengurangi jumlah partai, diharapkan akan tercipta stabilitas politik yang lebih baik, di mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih konsisten dan efektif. Sebagai contoh, sistem meritokrasi yang pernah diterapkan pada era Orde Baru di Indonesia, di mana jabatan-jabatan di bawah menteri diisi berdasarkan karir dan kompetensi, sering kali dianggap lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yamin dan Guntur (2018) menyatakan bahwa "sistem politik tanpa partai dapat meningkatkan meritokrasi dan mengurangi oligarki politik, sehingga memperkuat akuntabilitas pejabat publik."

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal dan dokumen resmi. Seperti yang dinyatakan oleh Creswell (2020), "pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan pengalaman individu dalam konteks sosial mereka." Analisis dilakukan dengan mengkaji teori-teori politik dan kebijakan publik yang relevan, serta mengkritisi praktik sistem politik multipartai di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi permasalahan sistem pemilu di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

yang mengidentifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi kebijakan.

## PEMBAHASAN

### Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum di Indonesia berfungsi sebagai pilar fundamental demokrasi, memberikan kerangka bagi warga negara untuk memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilu memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik, memastikan suara mereka didengar dan terwakili dalam pengambilan keputusan. Namun, sistem pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Prabowo (2023), "Sistem pemilihan umum di Indonesia, meskipun telah mengalami berbagai reformasi, masih menghadapi tantangan serius seperti politik uang, rendahnya partisipasi pemilih, dan kurangnya transparansi dalam proses pemilu. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik." Diskusi ini akan menguraikan beberapa masalah yang ada dalam sistem pemilu di Indonesia dan implikasinya terhadap demokrasi.

Untuk Sistem pemilu di Indonesia saat ini menggunakan model proporsional, yang dapat berupa sistem terbuka atau tertutup. Penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem ini memiliki dampak yang berbeda terhadap partisipasi pemilih dan stabilitas politik. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. Para pemilih tidak terbatas hanya memilih partai politik, mereka juga dapat memilih kandidat perorangan dari partai tersebut. Keuntungan utama sistem ini adalah peningkatan partisipasi pemilih, karena setiap orang merasa memiliki kendali langsung atas siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Mereka bisa memilih kandidat yang mereka yakini paling mewakili kepentingan mereka atau memiliki rekam jejak yang terpuji. Menurut Sari (2023), "Sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan bagi pemilih untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pemilu.

Namun, sistem proporsional terbuka menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, tingginya biaya kampanye. Para kandidat legislatif harus menginvestasikan dana yang besar untuk meningkatkan profil mereka di antara para pemilih, yang meliputi iklan, kampanye langsung, dan berbagai kegiatan publik. Hal ini menjadi penghalang bagi individu yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai, sehingga berpotensi mengurangi keragaman kandidat dalam pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Rahman (2023), "Tingginya biaya kampanye dalam sistem pemilihan umum di Indonesia menciptakan ketidakadilan, di mana hanya kandidat dengan dukungan finansial yang kuat yang dapat bersaing secara efektif, sehingga mengurangi peluang bagi calon dari latar belakang yang kurang beruntung. Kedua, terdapat keterbatasan informasi yang tersedia mengenai para kandidat. Para pemilih seringkali tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat mengenai kandidat legislatif. Banyaknya kandidat dari berbagai partai politik juga dapat membingungkan pemilih, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas proses pemilu. Selain itu, dalam beberapa kasus, para calon legislatif mungkin memprioritaskan kampanye pribadi di atas isu-isu kebijakan yang lebih luas, yang dapat mengurangi kualitas perdebatan politik dan pengambilan keputusan.

### Sistem Proporsional Tertutup

Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, pemilih memberikan suara untuk partai politik, bukan untuk calon legislatif secara individu. Hal ini memungkinkan partai-partai untuk menentukan urutan kandidat dalam daftar mereka, sehingga pemilih menyatakan dukungan mereka dengan memberikan suara untuk partai pilihan mereka. Menurut Prasetyo (2023), "Sistem ini berpotensi meningkatkan stabilitas politik karena partai-partai memiliki kontrol lebih besar atas siapa yang menduduki kursi parlemen."

Sistem proporsional tertutup juga memberikan peluang bagi partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen. Suara yang diperoleh sebuah partai tidak dibagi di antara banyak kandidat perorangan,

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

sehingga partai-partai kecil dengan dukungan terbatas tetapi konsisten bisa mendapatkan representasi. Hal ini dapat meningkatkan keragaman dan inklusivitas di dalam parlemen. Seperti yang diungkapkan oleh Prasetyo (2023), Sistem ini memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan dalam lanskap politik.

Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan. Partisipasi pemilih cenderung menurun, karena individu mungkin merasa kurang terlibat dalam proses pemilihan wakil rakyat. Para pemilih tidak memiliki kontrol langsung atas siapa yang akan dipilih sebagai anggota parlemen, yang bisa mengurangi akuntabilitas dan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen mereka.

Selain itu, sistem proporsional tertutup bisa memperkuat kekuasaan elit partai, yang mendikte urutan calon legislatif. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, karena pemilih tidak dapat menilai atau memilih kandidat individu berdasarkan kinerja atau reputasi mereka. Keputusan politik juga dapat lebih dipengaruhi oleh kepentingan internal partai daripada kepentingan publik yang lebih luas.

## Dampak Pemilu Serentak

Banyaknya informasi yang harus diproses oleh pemilih dalam jangka waktu yang terbatas dapat menyebabkan kebingungan dan keputusan yang kurang tepat saat memberikan suara. Pemilih diharuskan memilih kandidat untuk berbagai tingkat pemerintahan, termasuk kepresidenan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan badan legislatif provinsi dan kota. Setiap tingkatan menyajikan daftar panjang kandidat, yang mengharuskan pemilih untuk memahami profil dan program kerja masing-masing individu. Menurut Sari (2023), "Kebingungan yang dialami pemilih, terutama mereka yang kurang mendapat informasi, dapat mengakibatkan keputusan yang terburu-buru dan berdampak negatif pada kualitas hasil pemilu."

Pelaksanaan pemilu serentak dengan jumlah surat suara yang banyak secara signifikan meningkatkan beban kerja petugas pemilu. Panitia pemilu harus mengatur berbagai aspek logistik, mulai dari distribusi surat suara hingga pengaturan tempat pemungutan suara dan penghitungan suara. Beban kerja yang berat ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang serius di antara petugas pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Rahman (2023), "Kelelahan petugas pemilu tidak hanya memengaruhi kesehatan mereka, tetapi juga dapat mengganggu kualitas proses pemilu, termasuk risiko kesalahan dalam penghitungan suara.

Tujuan utama dari pemilu serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan koordinasi antara badan legislatif dan eksekutif. Namun, pelaksanaan pemilu semacam itu membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Pemerintah harus memastikan bahwa semua aspek logistik dan teknis diatur secara menyeluruh untuk mencegah masalah yang dapat mengganggu proses pemilu. Selain itu, sosialisasi yang luas kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa warga negara memahami proses pemilu dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Tanpa adanya persiapan dan penjangkauan yang memadai, tujuan efisiensi biaya dan koordinasi tidak dapat terwujud, sehingga berpotensi menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

## Masalah Keterwakilan dan Kualitas Demokrasi

Sistem multipartai di Indonesia sering menyebabkan fragmentasi politik yang menghambat pengambilan keputusan. Banyaknya partai politik, terutama partai kecil, dapat mengakibatkan representasi yang tidak efektif, di mana suara rakyat tidak selalu terwakili dengan baik. Menurut Sari (2023), "Fragmentasi ini berpotensi memperparah korupsi dan praktik politik uang, di mana calon legislatif lebih fokus pada penggalangan dana kampanye daripada melayani konstituen." Hal ini menciptakan lingkungan di mana keputusan kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat, merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan publik. Akibatnya, suara rakyat tidak selalu terwakili dengan baik, dan kebijakan yang dirumuskan mungkin tidak selaras dengan kebutuhan dan

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

aspirasi seluruh penduduk. Selain itu, sistem multipartai ini juga berpotensi memperparah korupsi dan praktik politik uang, di mana para calon anggota legislatif lebih memprioritaskan penggalangan dana untuk kampanye daripada melayani konstituen mereka. Politik uang menumbuhkan lingkungan di mana keputusan kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok daripada kesejahteraan masyarakat, merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik. Fragmentasi politik juga mengarah pada pembentukan koalisi yang tidak stabil, yang menghalangi pengambilan keputusan yang efektif. Ketidakstabilan ini mengharuskan pemerintah untuk terus menerus melakukan negosiasi dan kompromi, yang berpotensi mengakibatkan stagnasi dalam pemerintahan dan menghambat pelaksanaan program-program pembangunan. Oposisi yang lemah juga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, isu-isu representasi dan kualitas demokrasi dalam sistem multipartai di Indonesia membutuhkan reformasi struktural dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat demokrasi.

## Rekomendasi Perbaikan Sistem Pemilu

Berdasarkan analisis isu-isu yang ada, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi sistem proporsional terbuka dan tertutup untuk menentukan mana yang lebih efektif dalam mendukung demokrasi, dengan mempertimbangkan partisipasi pemilih dan representasi politik (Sari, 2023). Kedua, pendidikan politik harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat memahami proses pemilu dan pentingnya partisipasi mereka. Kampanye publik dan program pendidikan di sekolah dapat menjadi sarana efektif untuk ini (Rahman, 2023). Ketiga, partai politik perlu fokus pada pengembangan kader dan transparansi dalam seleksi kandidat untuk meningkatkan kepercayaan pemilih. Pengembangan kader yang baik akan memastikan anggota partai memiliki kompetensi yang diperlukan (Wibowo, 2023). Selain itu, reformasi struktural dalam sistem politik dan birokrasi sangat penting, termasuk penerapan prinsip meritokrasi dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat menciptakan sistem politik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Sistem proporsional terbuka cenderung meningkatkan partisipasi pemilih karena memberikan mereka lebih banyak kontrol dalam memilih calon legislatif. Namun, biaya kampanye yang tinggi menjadi penghalang utama bagi banyak calon potensial. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup dapat menurunkan partisipasi pemilih tetapi menawarkan stabilitas politik yang lebih baik dan memungkinkan partai kecil untuk mendapatkan representasi di parlemen. Sistem multipartai menciptakan tantangan dalam keterwakilan suara masyarakat, dengan potensi peningkatan korupsi dan praktik politik uang. Fragmentasi politik yang dihasilkan dari banyaknya partai politik dapat menghambat representasi yang efektif dan memperbesar potensi peningkatan korupsi dan praktik politik uang. Pelaksanaan pemilu serentak dapat meningkatkan efisiensi administratif dan koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, kebingungan di kalangan pemilih akibat banyaknya informasi yang harus diproses dapat berdampak negatif pada kualitas keputusan mereka. Beban kerja yang tinggi pada panitia pemilu juga berpotensi menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pemilu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta mengurangi potensi korupsi dalam proses politik. Reformasi ini termasuk mengevaluasi kembali sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, dan memperkuat partai politik melalui kaderisasi dan peningkatan citra.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

## KESIMPULAN

Sistem pemilihan umum di Indonesia memainkan peran krusial dalam pelaksanaan demokrasi, namun menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu proporsional, baik terbuka maupun tertutup, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun sistem proporsional terbuka dapat meningkatkan partisipasi pemilih, biaya kampanye yang tinggi dan keterbatasan informasi menjadi kendala. Di sisi lain, sistem tertutup berpotensi mengurangi partisipasi tetapi menawarkan stabilitas politik. Penerapan pemilu serentak di Indonesia bertujuan untuk efisiensi, namun juga menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih dan meningkatkan beban kerja bagi penyelenggara pemilu, yang dapat mengurangi kualitas keputusan yang diambil oleh pemilih. Fragmentasi politik akibat banyaknya partai politik sering kali menghambat keterwakilan suara masyarakat, sementara praktik korupsi dan politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap sistem pemilu yang ada, peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat, serta penguatan partai politik untuk meningkatkan kepercayaan publik. Reformasi dalam sistem pemilu sangat penting untuk memperbaiki akuntabilitas, transparansi, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, reformasi sistem pemilu harus menjadi prioritas agar dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## REFERENSI

- Creswell, J. W. (2020). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Husein, M. R. (2024). Korupsi dan Nepotisme dalam Birokrasi Indonesia: Studi Pengaruh Politik. *Jurnal Studi Pemerintahan Indonesia*, 8(1), 15-30.
- Kherid, A. (2021). Fragmentasi Politik dan Dampaknya terhadap Tata Kelola di Indonesia. *Jurnal Politik Asia Tenggara*, 12(3), 45-67.
- Lestari, N. (2024). Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Pilihan Pemilih di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 12-30.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Prabowo, A. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15(2), 101-120.
- Rahman, F. (2023). Biaya Kampanye dan Implikasinya terhadap Keragaman Kandidat dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(3), 78-92.
- Santoso, B. (2024). Inovasi dalam Sistem Pemilu: Menciptakan Partisipasi yang Lebih Baik. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 14(2), 50-65.
- Sari, D. (2023). Dampak Pemilihan Langsung terhadap Partisipasi Pemilih di Indonesia. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 14(1), 45-60.
- Setiawan, A. (2023). Keterbatasan Informasi dan Dampaknya terhadap Pemilih dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 15(2), 34-50.
- Supriyadi, R., & Wibowo, A. (2024). Alternatif Sistem Tanpa Partai di Indonesia: Analisis Kritis. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 15(1), 23-40.
- Wangsa, I., & Setiawan, B. (2023). Pro dan Kontra Sistem Tanpa Partai di Indonesia: Perspektif Politik. *Jurnal Politik Asia*, 9(4), 101-115.
- Wibowo, T. (2023). Pengembangan Kader Partai dan Transparansi dalam Proses Nominasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 15-30.
- Wicaksana, A., & Rahman, F. (2023). Reformasi Partai Politik di Indonesia: Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 78-92.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redactiongovernance@gmail.com](mailto:redactiongovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)